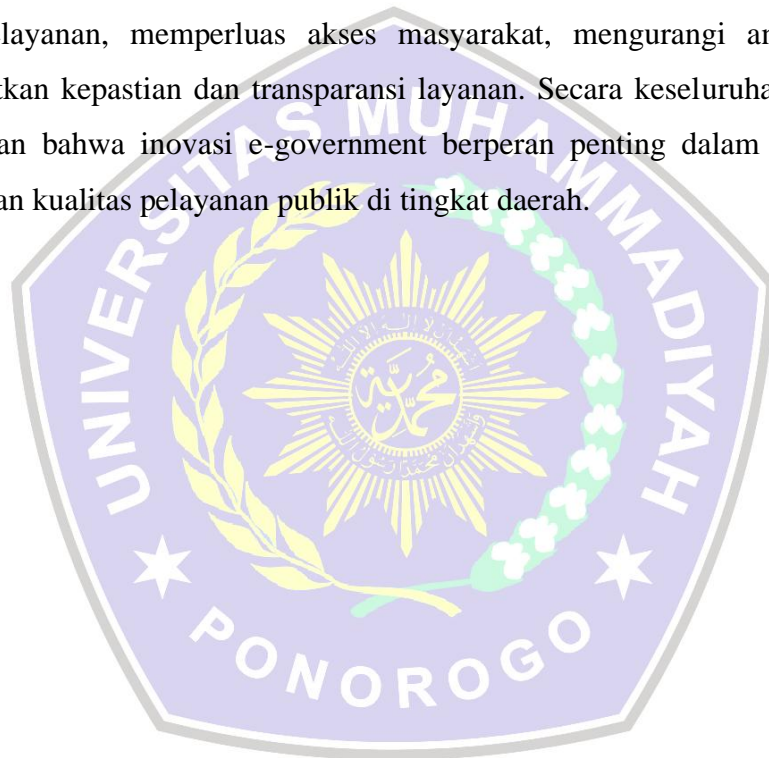


## DESKRIPSI SINGKAT KARYA ILMIAH

Karya ini membahas inovasi pelayanan publik berbasis e-government yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan studi dokumentasi untuk menganalisis berbagai inovasi layanan, seperti BUKA LAPAK, PAK DE BAYAN, SABTU TUNTAS, ANTRIAN ONLINE, dan PAK TUWA. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan inovasi berbasis teknologi informasi dan pelayanan jemput bola mampu mempercepat proses pelayanan, memperluas akses masyarakat, mengurangi antrian, serta meningkatkan kepastian dan transparansi layanan. Secara keseluruhan, karya ini menegaskan bahwa inovasi e-government berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Angliawati, R. Y. (2016). *Kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat*. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 45–56.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. (2024). *Kabupaten Magetan dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Magetan.
- Darmawan, D. (2011). *Kebijakan publik dan e-government*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, R. (2025). *Digitalisasi pelayanan publik dalam perspektif e-government*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 12–25.
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasanah, A. U., Andaryani, S., Sari, F. H., Dwikurniawati, I. U., & Lestari, D. P. (2024). *Inovasi pelayanan publik berbasis digital di pemerintah daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 1–15.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- OECD. (2005). *E-government for better government*. Paris: OECD Publishing.
- Pasolong, H. (2010). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Saputro, E. A. (2015). *Manajemen pelayanan publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sinambela, L. P. (2014). *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tui, F. P., Ilato, R., & Katili, A. Y. (2022). *Implementasi e-government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Jurnal Administrasi Negara*, 8(3), 201–213.

Yuono, Y. R. (2023). *Penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 89–102.

